

## 1. Tingkat Nasional

Penanggungjawab pengelolaan program tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, yang bertindak sebagai penyelenggara program (project executing agency) dengan menunjuk Satker P2KP Pusat (PMU) sebagai penanggungjawab operasional kegiatan.

Untuk membantu PMU melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP akan ditunjuk KMP (Konsultan Manajemen Pusat) P2KP-2 sebagai KMP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP, yang bertugas melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian KMW-KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) di seluruh wilayah dampingan. PMU Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP juga akan dibantu oleh Tim Advisory sebagai Research and Development (R & D) yang bertanggungjawab dalam menyusun konsep dan pengembangannya, melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan serta pengendalian substantif, selain itu PMU akan dibantu Project Manager untuk

pengendalian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP secara operasional.

Disamping itu Pemerintah Indonesia juga membentuk Tim Pengarah antar departemen yang terdiri dari Bappenas, Kantor Menko Kesra, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Negara dan Kantor Menpera.

## 2 Tingkat Propinsi

Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bappeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (TKPP) tingkat propinsi berkoordinasi dengan Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) P2KP tingkat propinsi. Selain itu dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akan ditangani oleh Satu KMW atau beberapa di masing-masing Propinsi, sesuai keputusan P2KP Pusat.

KMW-KMW P2KP saat ini (existing OC) yang memiliki kinerja baik sesuai dengan ketentuan P2KP Pusat akan diberi tugas tambahan mengendalikan dan memfasilitasi